

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Lala Putri Darunnisa, Herawansyah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Bengkulu

laladarunisa@gmail.com, herawansyah@unib.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the impact of capital expenditure in Bengkulu Province from 2018 to 2022 is related to local original income (PAD), general allocation funds (DAU), profit-sharing funds (DBH), and inflation. The study population consisted of local original income, general allocation funds, profit-sharing funds, inflation rates, and capital expenditures. Ten cities and regencies in Bengkulu Province. This study uses secondary data on the implementation of the 2018–2022 Bengkulu Provincial APBD budget obtained from the Directorate General of Financial Balance. WarpPLS software version 7.0 will be used as a data analysis tool to review research data. The conclusion of this study shows that although the general allocation fund does not have a significant effect and the inflation rate has a significant negative influence on capital expenditure, local original income, and profit-sharing funds have a significant positive influence.

Keywords: General Allocation Fund; Profit Sharing Fund; Local Original Revenue; Inflation rate.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak belanja modal di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 hingga 2022 terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan inflasi. Populasi penelitian terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, tingkat inflasi, dan belanja modal. Sepuluh kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai pelaksanaan anggaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018–2022 diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Perangkat lunak WarpPLS versi 7.0 akan digunakan sebagai alat analisis data untuk mengkaji data penelitian. Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa meskipun dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh signifikan dan tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja modal, namun pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif yang signifikan.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum; Dana Bagi Hasil; Pendapatan Asli Daerah; Tingkat Inflasi.

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah proses dimana pemerintah pusat menyediakan dana kepada pemerintah daerah agar mereka dapat terus menyediakan layanan publik. Desentralisasi berupaya memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah

dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dan memberikan wewenang yang lebih nyata kepada pemerintah. Agar daerah dapat memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian untuk setiap daerah maka diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk efektif dalam memanfaatkan aset lokal, menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat (Nuarisa, 2013). Otonomi setiap wilayah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Mengembangkan suatu daerah memerlukan belanja modal ketika melaksanakan desentralisasi. Sesuai dengan Bagan Akun Standar Kementerian Keuangan (PMK nomor 214/PMK.05/3013), belanja modal didefinisikan sebagai segala pengeluaran yang termasuk dalam kategori investasi dan berkaitan dengan perolehan atau penambahan aset tetap atau aset lain yang menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Pengeluaran ini melebihi apa yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan kapitalisasi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023).

Huda & Sumiati (2019) menyoroti belanja modal juga dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja modal sangatlah penting karena dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur daerah dan pelayanan publik (Maulana *et al.*, 2020). Infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong kemajuan perekonomian. Pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberikan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan sumber daya daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). PAD yang besar memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana belanja modal dengan hati-hati, sehingga memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya untuk infrastruktur dan proyek penting lainnya (Kamaludin & Usman, 2018). Fernandes *et al* (2021) dan Nadialista Kurniawan (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penggunaan penanaman modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mungkin dipisahkan dari pencapaian otonomi daerah secara penuh dan permanen. Penelitian Priatna & Purwadinata (2019) dan Al Habib Ahmad Nasution *et al* (2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Meskipun demikian, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, terbukti dari penelitian Pangestu *et al* (2019). Artinya belanja modal juga dipengaruhi oleh dana alokasi umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan oleh pemerintah pusat ke APBD, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pelayanan publik masyarakat. DAU direncanakan dan disalurkan melalui belanja modal. (Nadialista Kurniawan, 2021). DAU memiliki jumlah yang substansial dan merupakan sumber penerimaan penting

dalam belanja modal. Tujuan penggunaan DAU adalah untuk mendukung investasi dalam belanja modal dan mempromosikan prinsip desentralisasi serta pemerataan antar daerah. DAU merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang didanai modal kepada masyarakat umum. DAU memiliki dampak langsung dalam pengalokasian belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (Huda & Sumiati, 2019). Priatna & Purwadinata (2019), Huda & Sumiati (2019), dan Nadialista Kurniawan (2021), menyatakan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh dana alokasi umum. Temuan penelitian Sapulete et al (2022) membuktikan dampak DAU yang bermanfaat dan substansial terhadap belanja modal.

Menurut penelitian Yuliantoni & Arza (2021), dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal selain dana alokasi umum. Yuliantoni & Arza (2021) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dana bagi hasil (DBH) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke daerah sesuai dengan persentase tertentu dalam rangka membantu pembiayaan. persyaratan regional sambil menerapkan desentralisasi administrasi. Yuliantoni & Arza (2021) menyatakan bahwa DBH merupakan alat penting yang membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan belanja modal dan mengamankan dana untuk pertumbuhan. Potensinya juga besar sebagai sumber pendapatan. Sebagai sumber pendapatan utama daerah, dana bagi hasil (DBH) memiliki potensi besar dan berperan sebagai sarana penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek modal dan pertumbuhan. DBH diterapkan dengan tujuan mengoreksi kesenjangan hierarki antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui peran vital wilayah penghasil pendapatan sebagai pemangku kepentingan utama dalam peningkatan pembangunan daerah, terutama dalam menyediakan infrastruktur, fasilitas, serta meningkatkan mutu layanan kepada publik (Bakhrudin et al., 2020). Sukmaji & Rohman (2019) Dana bagi hasil menurut Pane *et al* (2021), berdampak besar terhadap belanja modal. Menurut penelitian Pendapatan *et al* (2021) Prasetyo & Rusdi (2021), dan Trisnani & Isthika (2022), dana bagi hasil mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap belanja modal.

Untuk memenuhi kebutuhan daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil perlu di alokasikan dengan baik. Dalam pelaksanaan belanja modal perlu mempertimbangkan tingkat inflasi yang berlaku (Salim, 2019). Hasil riset Salim (2019) menunjukkan bahwa selain DAU, DBH tingkat inflasi juga mempengaruhi belanja modal. Tingkat inflasi akan mencerminkan seberapa besar pengeluaran yang terkait dengan belanja modal. Inflasi yang terjadi di Bengkulu pada triwulan II tahun 2022 meningkat karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan harga bahan baku, tenaga kerja dan biaya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dimana secara tidak langsung berpengaruh pada anggaran belanja modal. Pada triwulan terakhir tahun 2022, provinsi Bengkulu mencatat tingkat inflasi sebesar 4,95% mengalami peningkatan dari angka inflasi pada triwulan pertama yang hanya mencapai 2,83%. Ini juga melebihi tingkat inflasi nasional yang mencapai 4,35% serta melampaui tren inflasi di Bengkulu selama tiga tahun terakhir yang rata-

rata sekitar 1,64% (Bank Indonesia, 2022).

Temuan beberapa penelitian sebelumnya, termasuk yang dilakukan Putri (2016) dan Hailuddin *et al* (2022), menunjukkan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan menguntungkan. Karena inflasi mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan dunia usaha harus menyesuaikan cara mereka memilih, menganggarkan, dan melaksanakan proyek belanja modal. Hal ini mempunyai dampak yang besar terhadap proses pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Namun penelitian Simanungkalit (2020) dan Aji *et al* (2023) tidak menemukan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Bengkulu dalam belanja modal, sebagai bentuk daerah yang menerapkan kebijakan desentralisasi memiliki gambaran belanja modal. Realisasi belanja modal di Provinsi Bengkulu mencapai 90,13% pada tahun 2018. Sedangkan pada kuartal kedua tahun 2019, belanja modal pemerintah di Provinsi Bengkulu meningkat mencapai 91,84% dari total anggaran. Pada kuartal kedua tahun 2020, belanja modal pemerintah di Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 69,32%, hal ini menurun karena provinsi Bengkulu menerapkan berbagai upaya untuk melaksanakan belanja modal dengan efektif selama pandemi COVID-19 (Tama, 2022). Pada tahun 2021 realisasi belanja modal mencapai 87,30% dan menurun pada 2022 yang hanya mencapai 85,07%. Data terperinci disajikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran (a)	Realisasi (b)	Persentase (b /a x 100%)
2018	Rp. 2.251,77	Rp. 2.029,48	90,13%
2019	Rp. 238.368,92	Rp. 218.913,81	91,84%
2020	Rp. 2.744,20	Rp. 1.902,41	69,32%
2021	Rp. 1.808,04	Rp. 1.578,39	87,30%
2022	Rp.1.620,76	Rp. 1.378,77	85,07%

sumber: (Portal Data SIKD, n.d.)

Masyarakat berperan sebagai prinsipal dalam penelitian ini, sedangkan pemerintah berperan sebagai agen yang mengelola uang masyarakat demi kemajuan kepentingan masyarakat. Ini adalah penerapan teori agensi. Pembayaran pajak dari masyarakat umum diberikan kepada pemerintah. Meskipun demikian, organisasi publik memodifikasi pendekatan pengelolaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah yang dibayarkan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pendanaan pembangunan daerah dalam kerangka teori keagenan. pengeluaran modal. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Dalam hal ini, segala upaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat berada di

tangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik kuantitatif digunakan. Pembahasannya seputar pelaksanaan anggaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018–2022. Variabel independen dan dependen dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja modal. Variabel independen yang diberi bobot cukup besar adalah: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan tingkat inflasi.

Populasi penelitian terdiri dari pendapatan daerah, belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan tingkat inflasi. Sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dijadikan sampel untuk investigasi ini. Informasi tambahan mengenai pelaksanaan anggaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018–2022 dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk analisis data pada data penelitian akan digunakan software WarpPLS versi 7.0. Untuk Persamaan regresi yang dikembangkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Dana Alokasi Umum

X_3 : Dana Bagi Hasil

X_4 : Tingkat Inflasi

Berikut merupakan Teknik yang digunakan dalam menganalisis data:

Analisis Deskriptif

Uji statistik yang disebut analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau mengkarakterisasi sekumpulan data atau suatu peristiwa. Analisis ini dapat digunakan untuk mengkarakterisasi keadaan dunia nyata di sekitar objek penelitian atau untuk melihat bagaimana data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian didistribusikan.

Uji Fit Model

Untuk mengetahui apakah model penelitian memenuhi syarat ideal maka dilakukan uji kecocokan model. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa baik hubungan variabel laten satu sama lain. Jika kovarians suatu model dan kovarians matriks data cocok, maka model tersebut dikatakan fit.

Uji Hipotesis

Kapasitas model untuk menggambarkan bagaimana gabungan pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen dievaluasi dengan

menggunakan uji koefisien determinasi. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis diterima; jika kurang dari 0,05 maka ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat inflasi, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan faktor perekonomian daerah lainnya menjadi topik utama penelitian ini. PAD adalah uang yang dihasilkan daerah tersebut dari hal-hal seperti pajak properti dan kendaraan bermotor. Sementara DBH ditopang oleh sumber daya alam seperti gas dan minyak yang berasal dari pemerintah federal. Meningkatnya biaya barang dan jasa suatu daerah ditunjukkan oleh tingkat inflasi. Fokus utama studi ini adalah belanja modal, khususnya bagaimana pemerintah daerah menggunakan uangnya untuk investasi jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, PAD, dan DBH terhadap jumlah belanja modal.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Seviiasi
PAD	50	11140	200420	67652.40	44996.139
DAU	50	370400	711790	498744.80	92224.868
DBH	50	11360	118840	30235.60	20276.482
BELANJA_MODAL	50	35200	352390	141846.00	51091.281
N	50				

Uji Fit Model

Untuk mengetahui apakah model penelitian memenuhi syarat ideal maka dilakukan uji kecocokan model. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa baik hubungan variabel laten satu sama lain. Jika matriks kovarians suatu model dan kovarians matriks datanya cocok, maka model tersebut dianggap fit.

Tabel 3. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Seviiasi
PAD	50	11140	200420	67652.40	44996.139
DAU	50	370400	711790	498744.80	92224.868
DBH	50	11360	118840	30235.60	20276.482
BELANJA_MODAL	50	35200	352390	141846.00	51091.281
N	50				

Dari hasil uji fit model dapat dilihat bahwasanya seluruh hasil uji memenuhi kriteria. Sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini baik untuk dilakukan dan diuji hipotesisnya.

Uji Hipotesis

Kapasitas model untuk menggambarkan bagaimana gabungan pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen dievaluasi dengan menggunakan uji koefisien determinasi. Nilai R Squared (R^2) yang memiliki rentang 0 hingga 1 digunakan dalam pengujian ini. Semakin baik, semakin mendekati 1.

Dalam hal ini kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 51% yang ditunjukkan dengan nilai R^2 sebesar 0,512. Sementara itu, faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini menyumbang sisanya.

Tabel 3. Hasil Uji R Squared dan Effect Size

	X1	X2	X3	X4	Y
R Squared					0.512
Adjusted R Squared					0.469
R Squared Contributions	0.280	0.073	0.063	0.096	0.280
Effect Size	0.280	0.073	0.063	0.096	0.280

Tabel 4. Hasil dari Pengujian Hipotesis

No	Hubungan antar variabel		Koefisien jalur	P-value	Keterangan
1	X1	Y	0.446	<0.001	Significant
2	X2	Y	0.120	0.189	Tidak Significant
3	X3	Y	0.239	0.035	Significant
4	X4	Y	-0.317	0.007	Significant

- 1) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Belanja Modal (Y) berkorelasi positif, dengan koefisien jalur sebesar 0,446 dan p-value kurang dari 0,001. Hipotesis diterima bila hasil $p < 0,05$ menunjukkan data signifikan.
- 2) Karena $p > 0,05$ menunjukkan hubungan tidak signifikan maka hipotesis ditolak. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal (Y) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,120 bertanda positif dan nilai $p = 0,189$.
- 3) Koefisien jalur positif sebesar 0,239 dan $p = 0,035$ menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (X3) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Karena nilai p kurang dari 0,05 maka dianggap signifikan dan hipotesis disetujui.
- 4) Investasi modal dipengaruhi oleh variabel Tingkat Inflasi (X3). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur negatif sebesar -0,317 dan p-value sebesar 0,007. Karena nilai p kurang dari 0,05, hipotesis dianggap signifikan.

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Nilai p sebesar 0,01 dan koefisien positif (β) sebesar 0,446, keduanya berada di bawah tingkat signifikansi α sebesar 5%. Hal ini memperkuat gagasan bahwa PAD mempengaruhi belanja modal secara signifikan dan menguntungkan. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal dialokasikan sesuai dengan pendapatan PAD karena peningkatan PAD secara tidak sengaja mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam teori agensi, pendapatan asli daerah (PAD) mencerminkan tingkat kontrol yang dimiliki oleh pemilik aset terhadap agennya, sementara belanja modal merujuk pada investasi jangka panjang perusahaan. Tingkat PAD mempengaruhi kemampuan pemilik aset untuk memengaruhi keputusan investasi belanja modal yang diambil oleh agen atau manajer.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Pangestu dkk. (2019), Maulana dkk. (2020), Prasetyo & Rusdi (2021), dan Trisnani & Isthika (2022), belanja modal dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan asli daerah. Temuan ini konsisten dengan temuan penelitian ini. Data yang menunjukkan manfaat PAD terhadap distribusi belanja modal di daerah-daerah yang diperbandingkan adalah konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh data ini.

Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Di Provinsi Bengkulu, Dana Alokasi Umum (DAU) tampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, dibuktikan dengan nilai koefisien (β) yang positif sebesar 0,120 dan nilai p -value sebesar 0,189, keduanya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai p -value sebesar 0,189. nilai α pada taraf signifikansi 5%. Oleh karena itu, hipotesis awal yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Bengkulu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU ternyata belum berdampak pada peningkatan investasi di bidang tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian lain yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018), Sandi *et al* (2019) yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara dana alokasi umum dan belanja modal.

Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal

Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap belanja modal, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur positif sebesar 0,239 dan $p = 0,035$ yang keduanya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa dana bagi hasil mempunyai dampak terhadap belanja modal. Oleh karena itu, belanja modal akan meningkat secara proporsional terhadap DBH. Dalam teori agensi, Dana Bagi Hasil (DBH) bisa menjadi insentif yang mendorong agen, seperti manajer, untuk bertindak sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik aset. Penggunaan DBH yang tepat dapat menjadi motivasi bagi agen untuk membuat

keputusan investasi belanja modal yang lebih baik karena imbalan yang mereka terima terkait dengan kinerja atau hasil dari investasi tersebut.

Temuan tes tersebut mendukung temuan penelitian Bakhrudin *et al* (2020), Prasetyo & Rusdi (2021), Pane *et al* (2021), Trisnani & Isthika (2022), dan Sapulete *et al* (2022) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal

Nilai p-value sebesar 0,007 dan koefisien jalur negatif sebesar -0,317 menunjukkan bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap belanja modal. Hubungan antara tingkat inflasi dan belanja modal bukan merupakan suatu kebetulan, karena signifikansi statistik dengan nilai p kurang dari 0,05, mendukung teori bahwa tingkat inflasi mempengaruhi belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika Tingkat Inflasi meningkat, Belanja Modal cenderung menurun, sesuai dengan koefisien jalur yang negatif. Implikasi dari pengaruh negatif ini adalah bahwa kondisi inflasi yang tinggi dapat menghambat alokasi dana untuk belanja modal. Dalam teori agensi, inflasi bisa memengaruhi cara pemerintah membuat keputusan tentang belanja modal karena dampaknya terhadap biaya, nilai sebenarnya dari investasi, dan pendekatan keuangan yang dipilih dalam kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh inflasi. Temuan penelitian ini konsisten dengan sejumlah penelitian sebelumnya; Putri (2016) dan Hailuddin *et al* (2022) misalnya, menemukan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan menguntungkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan analisis menunjukkan bahwa alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD). Temuan ini memvalidasi korelasi substansial antara peningkatan PAD dan peningkatan alokasi belanja modal, khususnya dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana publik. Namun, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlalu berpengaruh terhadap belanja modal di daerah. Sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, data menunjukkan bahwa kenaikan DAU tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap alokasi dana untuk proyek-proyek modal di Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, studi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh yang besar terhadap belanja modal, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan DBH dapat mengakibatkan peningkatan alokasi belanja modal daerah. Namun, kini terlihat bahwa laju inflasi berdampak negatif terhadap distribusi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika inflasi meningkat, pembiayaan belanja modal seringkali diberikan dengan tingkat yang menurun.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan tingkat inflasi di daerah harus dipertimbangkan ketika membenarkan peningkatan belanja modal. Penelitian lebih

lanjut diharapkan dapat mengidentifikasi variabel-variabel tambahan yang dapat mempengaruhi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G., Tsani Salsabila, P., Nur stiqomah, M., Ningrum, M., & 'arifina, M. (2023). Analisis Pmdn, Pma, Inflasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 250–267. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1138>
- Al Habib Ahmad Nasution, S., Zainal Arifin, K., & Choiruddin, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1637–1656. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.217>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Bakhrudin, Setiawan, M. A., & Sutrisno. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 32.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus 2022. In *Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus 2022* (Vol. 10, Issue Agustus, p. 71). <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/bengkulu/Default.aspx>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja pengklasifikasian belanja daerah?* <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-pengklasifikasian-belanja-daerah>
- Fernandes, J., Oktavia, D., Fernandes, J., & Oktavia, D. (2021). 1, 2, 5(1), 61–70.
- Hailuddin, Nourmalita, U., & Wijimulawiani, B. S. (2022). Belanja Modal dan Tingkat Inflasi serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2019. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.89>
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
- Kamaludin, K., & Usman, B. (2018). Policy regime and policy change: Comparing the

phenomenon of local government before and after regional autonomy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 1-22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.940>

Maulana, I. A., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 86. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7102>

Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689-1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Accounting Analysis Jurnal* (Vol. 2, Issue 1).

Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 31-44. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>

Pangestu p, P., Rianny, M., Paramita J.S, E., & Sundaning K, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 26-32. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8445>

Pendapatan, P., Daerah, A., Alokasi, D., Khusus, D. A., Hasil, D. B., Abbas, D. S., Hakim, M. Z., & Novayandi, I. (2021). *SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP Metode Penelitian*. 24, 687-692.

Portal Data SIKD. (n.d.).

Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 48-75. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/17867>

Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 62-74. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/118>

Putri, Z. E. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi*, 5(2), 173-186.

<https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>

- Salim, A. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN INFLASI TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PERIODE TAHUN 2015 – 2018 (Penelitian di Kota/Kabupaten Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 164–179. <https://doi.org/10.48181/jrtirtayasa.v4i2.5875>
- Sandi, D., Kepramareni, P., & Yulastuti, I. A. N. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1), 133–152.
- Sapulete, D. C. N., Salle, A., & Bleskadit, N. H. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 178–189. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2586>
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi. *Journal of Management*, 13(3), 327–340.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–9.
- Tama, R. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi* <http://eprints.ipdn.ac.id/10641/>
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>